

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan global, khususnya pemanasan global dan perubahan iklim, menjadi salah satu persoalan paling mendesak di bumi ini karena dampaknya yang secara langsung mengancam keberlangsungan hidup manusia. Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer telah memicu berbagai perubahan ekstrem, mulai dari pola cuaca yang tidak menentu, naiknya permukaan laut, hingga kerusakan ekosistem yang berimbas pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan di berbagai negara (IPCC, 2021). Kondisi ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk berkomitmen mengurangi emisi GRK.

Bahaya emisi karbon terhadap kehidupan manusia dan planet bumi tidak dapat diabaikan. Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer berkontribusi langsung pada fenomena *ocean acidification* atau pengasaman laut, yang mengancam keanekaragaman hayati laut dan mengganggu rantai pangan global (Doney *et al.*, 2020). Laporan IPCC (2023) menegaskan bahwa jika tren emisi karbon global tidak segera dikendalikan, kenaikan suhu rata-rata bumi berpotensi melampaui ambang 1,5°C pada dekade 2030-an, yang akan memicu konsekuensi bencana bagi ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan manusia secara masif.

Mengacu rekomendasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan telah diundangkan dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025, ada 6 jenis emisi yang menjadi fokus penurunan GRK, yaitu *karbon dioksida* (CO₂), *metana* (CH₄), *dinitrogen oksida* (N₂O), *hidrofluorokarbon* (HFCs), *perfluorokarbon* (PFCs), dan

sulfur heksafluorida (SF₆). Berdasarkan laporan inventarisasi emisi nasional yang disajikan Indonesia pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), CO₂ menyumbang porsi terbesar dari total emisi nasional, terutama berasal dari sektor energi serta perubahan penggunaan lahan dan kebakaran gambut, sedangkan CH₄ dan N₂O banyak dihasilkan dari sektor pertanian, limbah, dan pembakaran biomassa.

Posisi Indonesia dalam peta emisi global bukan sekadar catatan biasa, menurut *Statistical Review of World Energy 2024* yang dirilis Energy Institute, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai penyumbang emisi GRK terbesar di dunia dari sektor energi, dengan total emisi mencapai sekitar 701,4 juta ton setara CO₂ pada tahun 2023 (Energy Institute, 2024). Indonesia juga pernah mengalami peristiwa kebakaran lahan gambut tahun 2015 yang melibatkan PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan, di mana terbakarnya lahan gambut melepaskan cadangan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, memperburuk kualitas udara, serta mempercepat akumulasi GRK yang pada akhirnya turut mendorong percepatan perubahan iklim.

Menghadapi fenomena tersebut, Indonesia berkomitmen melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) mendorong perusahaan untuk turut berkontribusi dalam agenda dekarbonisasi secara lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menekan jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya, tetapi juga wajib mengomunikasikan upaya tersebut secara akuntabel dan transparan kepada publik (Yulianti & Waworuntu, 2024). Salah satu bentuk transparansi yang kini semakin

mendapat perhatian sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi adalah pengungkapan emisi karbon atau yang disebut *Carbon Emission Disclosure* (CED).

Secara konseptual *Carbon Emission Disclosure* (CED) merupakan langkah taktis perusahaan dalam menyajikan data emisi karbon secara terbuka kepada publik sebagai bagian integral dari pelaporan keberlanjutan. Informasi yang dipublikasikan tersebut menguraikan akumulasi GRK yang timbul sebagai konsekuensi dari kegiatan produksi serta operasional perusahaan, strategi pengurangan yang diterapkan, target penurunan emisi, serta upaya pengelolaan dampak lingkungan secara menyeluruh (Yulianti & Waworuntu, 2024). CED tidak sekadar berfungsi sebagai pelaporan angka emisi, melainkan sebagai cerminan dari seberapa serius perusahaan mengintegrasikan komitmen lingkungannya ke dalam pengambilan keputusan strategis (Luo & Tang, 2014; Wahyuningrum *et al.*, 2024).

Pengungkapan informasi emisi karbon yang diselenggarakan secara transparan memberikan dampak signifikan terhadap hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan yang menghadapi tekanan dari regulator dan publik cenderung meningkatkan pengeluaran untuk lingkungan dan menjadi lebih transparan dalam pelaporan emisi karbon (Imansari *et al.*, 2024).

Dalam regulasi di Indonesia, ketentuan yang menjadi landasan terkait pelaporan dan pengungkapan aspek keberlanjutan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengatur penerapan prinsip keuangan berkelanjutan memberikan mandat bagi seluruh emiten serta entitas bisnis terbuka untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Namun demikian, peraturan ini belum secara eksplisit

mengatur pengungkapan emisi karbon secara kuantitatif dan terstandar, sehingga praktik pengungkapan emisi karbon masih sangat bergantung pada inisiatif masing-masing perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa pengungkapan emisi karbon umumnya dilakukan secara sukarela dalam bentuk penyampaian informasi terkait emisi, penggunaan energi, serta inisiatif perubahan iklim tanpa adanya standar yang seragam dan mengikat (Houten & Wedari, 2023).

Bukti empiris menunjukkan bahwa rendahnya praktik ini bukan sekadar asumsi. Kiswanto *et al.*, (2023) mengemukakan hanya berkisar 7 hingga 8 item dari 18 item yang seharusnya disajikan dalam laporan keberlanjutan, artinya tidak sampai separuh informasi yang semestinya disampaikan kepada publik. Selain itu, Sudjono & Setiawan, (2022) yang berfokus pada perusahaan sektor batubara menemukan bahwa 34,62% perusahaan di sektor tersebut belum mengungkapkan emisi karbonnya sama sekali. Studi yang menganalisis korporasi non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2016 hingga 2022 menunjukkan rata-rata tingkat pengungkapan emisi karbon hanya sebesar 23,28%, dengan perbedaan yang sangat besar antara perusahaan dengan tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 60% dan yang terendah hanya sebesar 1% (Wahyuningrum *et al.*, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar perusahaan, pengungkapan emisi karbon masih dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai investasi reputasi dan kepercayaan investor. Padahal, di tengah perkembangan global yang semakin mengutamakan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), perusahaan yang

abai pada transparansi emisi berisiko mengalami tekanan dari investor institusional, lembaga pemeringkat, maupun pasar modal internasional (Krueger *et al.*, 2024)

Kondisi rendahnya praktik CED di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas mendorong munculnya pertanyaan mendasar dalam literatur akuntansi lingkungan, yaitu faktor-faktor apa yang sesungguhnya mendorong atau menghambat sebuah perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya. Keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kapasitas keuangan perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki fondasi keuangan yang kokoh cenderung lebih mampu menanggung biaya yang muncul dari kegiatan pengungkapan, sedangkan perusahaan dengan tekanan keuangan yang tinggi justru cenderung memprioritaskan kelangsungan operasional dibandingkan transparansi lingkungan (Alfiana *et al.*, 2025). Pemahaman inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk menguji karakteristik keuangan perusahaan sebagai determinan utama CED, di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas (Andriadi *et al.*, 2023; Widyastuti *et al.*, 2023). Namun, alih-alih menghasilkan konsensus, penelitian-penelitian tersebut justru melahirkan temuan yang saling bertentangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Ukuran perusahaan menjadi faktor yang paling sering diuji karena perusahaan besar lebih disorot publik dan pemangku kepentingan, sehingga terdorong untuk lebih terbuka soal jejak karbonnya demi menjaga legitimasi. Syahdanti dan Marietza (2024) serta Yulianti dan Waworuntu (2024) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CED karena perusahaan

besar didukung sumber daya dan infrastruktur pelaporan yang lebih memadai. Namun, Gunawan dan Aryati (2024) justru menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, dengan alasan sifat pengungkapan di Indonesia yang masih sukarela membuat besar-kecilnya perusahaan tidak otomatis mendorong keterbukaan.

Profitabilitas dianggap mencerminkan kemampuan perusahaan mendanai kegiatan pengungkapan. Syahdanti dan Marietza (2024) dan Yulianti dan Waworuntu (2024) menemukan profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap CED, sebab perusahaan yang labanya stabil lebih leluasa memberi tanda baik kepada pemangku kepentingan lewat transparansi lingkungan. Sebaliknya, Gunawan dan Aryati (2024) menemukan pengaruh negatif, semakin tinggi laba, perusahaan justru semakin enggan mengungkap karena biaya untuk mereduksi dan melaporkan emisi dapat menggerus keuntungan.

Leverage atau tingkat utang juga dikaitkan dengan keterbukaan informasi lingkungan. Mansour *et al.* (2025) yang meneliti perusahaan di negara-negara ASEAN menemukan *leverage* berpengaruh signifikan, sebab perusahaan dengan utang tinggi ditekan kreditur untuk lebih transparan soal risiko lingkungan yang bisa memengaruhi kemampuan bayarannya. Namun temuan ini tidak seragam, Syahdanti dan Marietza (2024), Gunawan dan Aryati (2024) yang mengukurnya dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR), maupun Widianingsih (2025) pada sektor energi sama-sama menemukan *leverage* tidak berpengaruh terhadap CED, karena perusahaan cenderung berhati-hati mengingat pengungkapan masih bersifat sukarela dan berpotensi menambah biaya.

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus menyediakan sumber daya untuk kegiatan di luar operasional, termasuk pengungkapan (Widyastuti *et al.*, 2023). Wardhani dan Kawedar (2019) serta Yulianti dan Waworuntu (2024) menemukan likuiditas berpengaruh positif terhadap CED, sebab perusahaan yang likuiditasnya sehat memakai pengungkapan yang lebih rinci sebagai tanda kepada investor dan kreditur bahwa operasinya termasuk pengelolaan lingkungan berjalan baik. Namun, Gunawan dan Aryati (2024) menemukan likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* tidak berpengaruh, karena perusahaan yang likuid pun belum tentu mengalokasikan dananya untuk pengungkapan yang sifatnya masih sukarela.

Rangkaian temuan yang saling bertentangan pada keempat variabel di atas bukan sekadar persoalan teknis statistik, melainkan mencerminkan kelemahan mendasar yang belum terselesaikan dalam literatur CED di Indonesia. Pertama, terdapat kesenjangan sektoral yang signifikan karena mayoritas penelitian berfokus pada perusahaan manufaktur, pertambangan, atau lintas sektor secara umum, sementara sektor energi yang justru menyumbang porsi terbesar emisi gas rumah kaca Indonesia hanya sedikit dijadikan objek kajian yang spesifik, sehingga temuan dari sektor lain belum tentu relevan untuk menjelaskan perilaku pengungkapan perusahaan energi. Kedua, inkonsistensi hasil terjadi secara merata pada seluruh variabel penjelas utama, dengan ukuran perusahaan yang dalam sebagian studi terbukti berpengaruh positif ternyata tidak signifikan di studi lain, profitabilitas yang di satu sisi diyakini mendorong pengungkapan justru ditemukan berpengaruh negatif di sisi lain, *leverage* dan likuiditas yang seharusnya mencerminkan

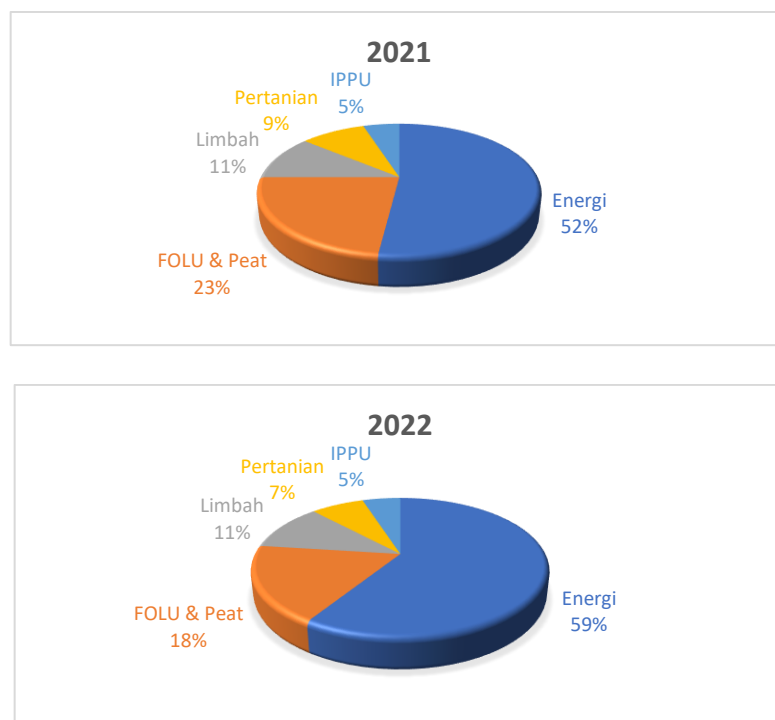
kapasitas dan tekanan pengungkapan pun menunjukkan pola yang tidak menentu tanpa ada konsensus yang jelas mengenai arah dan kekuatan hubungannya. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data sebelum tahun 2022, yaitu periode kewajiban penerbitan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) bagi emiten dan perusahaan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif.

Akibatnya, penelitian yang menggunakan data sebelum tahun 2022 berpotensi menghasilkan temuan yang tidak lagi relevan untuk menggambarkan perilaku pengungkapan emisi karbon saat ini, mengingat keterbatasan dan penyesuaian untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir bukan sekadar untuk mengulangi pengujian yang sudah ada, melainkan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab secara meyakinkan, yaitu apakah eksistensi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara konsisten memengaruhi *carbon emission disclosure* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2021 hingga 2024.

Riset ini memfokuskan objek kajian pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Pemilihan sektor energi dilatarbelakangi oleh fakta bahwa aktivitas operasional perusahaan dalam sektor ini secara langsung berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan berkontribusi signifikan terhadap emisi GRK. Sektor industri Indonesia termasuk energi menyumbang hampir 75% dari total emisi gas rumah kaca negara (WRI, 2024). Pada gambar 1.1 digambarkan juga pada tahun 2021 dan 2022 pada laporan inventarisasi GRK 2023, KLHK menyatakan bahwa sektor energi menyumbang emisi paling besar yaitu 52% pada tahun 2021 dan 59% pada tahun 2022, dengan

bukti yang valid dan kajian sektor energi yang minim, menjadikan sektor ini sangat relevan untuk dikaji dalam pengungkapan emisi karbon.

Gambar 1. 1 Kontribusi Sektoral Terhadap Emisi GRK Nasional



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023)

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun urgensi pengungkapan emisi karbon semakin diakui secara global, praktik CED di Indonesia masih berada pada level yang minimum dan tanpa standar yang mengikat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang nyata antara tuntutan transparansi iklim global dengan realitas pelaporan entitas bisnis di Indonesia, khususnya pada sektor energi yang secara operasional paling langsung berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca namun justru belum mendapat perhatian memadai dalam kajian empiris CED.

Di sisi lain, temuan-temuan empiris terkait determinan yang mengintervensi CED masih memaparkan konklusi inkonsistensi. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, maupun likuiditas terhadap tingkat transparansi emisi karbon belum menghasilkan kesimpulan yang seragam di berbagai penelitian, baik dari sisi sektor yang diteliti, periode pengamatan, maupun kondisi kelembagaan masing-masing negara. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan dengan keputusan pengungkapan emisi karbon tidak dapat digeneralisasi begitu saja, sehingga pengujian ulang dalam setting spesifik sektor energi Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan kesenjangan teoretis, dan inkonsistensi empiris penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjawab persoalan yang telah diidentifikasi dalam latar belakang dan rumusan masalah, yakni masih rendahnya praktik CED di

Indonesia yang diduga dipengaruhi oleh karakteristik keuangan perusahaan, namun bukti empirisnya masih jauh dari konsisten. Dengan berfokus pada korporasi sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2024, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh likuiditas terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Carbon Emission Disclosure*” penulis berharap dapat menyajikan penelitian yang luas bagi dunia akademisi dan praktisi. Saat ini, isu pemanasan global dan pemeliharaan lingkungan oleh sektor bisnis kian disorot, sehingga pengungkapan emisi karbon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan komprehensif perusahaan. Pada fenomena tersebut, studi ini dirancang untuk mendalami berbagai variabel yang memengaruhi kebijakan transparansi emisi tersebut, serta menjadi bahan referensi yang valid bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Target capaian dan manfaat dari analisis ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian di bidang akuntansi lingkungan, khususnya dalam kebijakan implementasi *Carbon Emission Disclosure* (CED) di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat *legitimacy theory* yang memandang pelaporan emisi karbon sebagai upaya strategis bagi entitas bisnis dalam mempertahankan sekaligus menjaga pengakuan (*legitimacy*) dari lingkungan sosial di tengah meningkatnya tekanan publik dan regulasi terhadap isu perubahan iklim, terutama bagi perusahaan di sektor energi yang secara langsung berhadapan dengan tuntutan dekarbonisasi global.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyajikan potret sekaligus rujukan strategis bagi jajaran manajemen perusahaan sektor energi dalam merancang kebijakan pengungkapan GRK yang lebih sistematis dan komprehensif. Temuan dari studi ini diproyeksikan mampu memberikan pemahaman bagi sektor korporasi mengenai urgensi keterbukaan informasi lingkungan dalam mendukung pencapaian SDGs dan melakukan pengungkapan emisi karbon secara sukarela sebagai bagian dari strategi legitimasi dan pengelolaan reputasi korporat, serta sebagai instrumen untuk menarik investor yang semakin *concern* terhadap aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

b. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Simpulan dari riset ini diproyeksikan mampu menyumbang rujukan serta basis evaluasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan regulator terkait dalam merumuskan pelaporan emisi karbon agar berjalan secara lebih tersistem, baku, dan menyeluruh. Hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk memperkuat kerangka regulasi pengungkapan karbon, merancang insentif yang tepat bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, serta mendukung percepatan pencapaian target *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan standar pengungkapan yang lebih adaptif terhadap karakteristik perusahaan di sektor dengan intensitas emisi tinggi.

c. Bagi Investor dan *Stakeholder*

Penelitian ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan melalui praktik pengungkapan emisi karbon. Konklusi akhir dari kajian ini diharapkan mampu bertindak sebagai pedoman saat menetapkan kebijakan atau proses pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi lingkungan. Bagi *stakeholder* eksternal seperti lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya monitoring dan advokasi terhadap praktik pengungkapan korporat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diorganisasikan ke dalam lima bab utama yang saling berkesinambungan satu sama lain. Bab I yang merupakan Pendahuluan memuat fondasi dasar riset yang menguraikan secara sistematis mengenai fenomena pada latar belakang, identifikasi rumusan masalah, sasaran serta kontribusi penelitian, hingga peta sistematika penulisan laporan. Selanjutnya, Bab II atau Tinjauan Pustaka mengelaborasi teoritis yang dijadikan sebagai pijakan analisis, sekaligus menyajikan telaah kritis terhadap studi-studi terdahulu yang relevan sebagai bahan komparasi. Pada bagian ini, dipaparkan pula alur logis dari kerangka berpikir beserta spesifikasi perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Pada Bab III yang membahas Metodologi Penelitian, dijabarkan secara rinci rancangan strategis yang diimplementasikan untuk membedah masalah, meliputi ragam pendekatan riset, batasan operasionalisasi indikator variabel, karakteristik populasi beserta teknik penentuan sampel, instrumen dan teknik penjarangan data, hingga formula analisis data yang digunakan. Kemudian, Bab IV menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan potret empiris mengenai objek yang diamati, laporan hasil komputasi data, pemaknaan atau interpretasi atas *output* yang diperoleh, serta diskusi mendalam yang mengonfrontasikan temuan riil di lapangan dengan basis teori penunjang. Terakhir, Bab V yang bertindak sebagai Penutup merangkum konklusi akhir dari seluruh hasil analisis, mengidentifikasi kekurangan atau keterbatasan teknis yang dihadapi

selama riset berlangsung, serta merumuskan saran aplikatif yang dapat dijadikan acuan bagi arah pengembangan studi selanjutnya.